

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**



Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmp tsp.kabpangandaran@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. /DPMPTSP/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 No. 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

31. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mengolah laporan data Laporan Kinerja dari setiap bidang;
 2. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada bidang dimaksud;
 4. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap bidang;
 5. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja kepada Bupati.
- KETIGA** : Rincian Tugas Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala Dinas ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,


Drs. H. NURMAN SOHBAUDIN
NIP. 19508241985031003



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. /DPMPTSP/2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | KEPALA DINAS |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DINAS |
| III. KOORDINATOR | : | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN |
| IV. KETUA | : | KEPALA SUB BAGIAN BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN |
| V. SEKRETARIS | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | 1. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI, PENGENDALIAN DAN INFORMASI; |
| | | 2. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; |
| VI. ANGGOTA | : | 3. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; |
| | | 4. KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN; |
| | | 5. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI; |
| | | 6. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI; |
| | | 7. KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI; |
| | | 8. KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN; |
| | | 9. KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I; |
| | | 10. KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II; |
| | | 11. PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM. |



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. /DPMPTSP/2022
TANGGAL : 31 Januari 2022**

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN**

- I. PENGARAH :
1. Memberikan arahan kepada Tim tentang materi Laporan Kinerja;
 2. Memberikan arahan kepada Tim tentang teknis Penyampaian Materi Laporan Kinerja.
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja.
- III. KOORDINATOR :
- Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
- IV. KETUA :
- Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan penyusunan laporan kinerja.
- V. SEKRETARIS :
1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja.
- VI. ANGGOTA :
1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan bidang;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dengan mengelompokkan dari sasaran tiap bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan realisasi yang dicapai tiap bidang (sasaran dan program).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Pangandaran kepada Bupati Pangandaran dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya.

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP yang diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018. Tugas utama DPMPTSP Kabupaten Pangandaran ialah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berpedoman pada penetapan pembentukan DPMPTSP sekaligus menyelaraskan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-4 (empat) Kabupaten Pangandaran yakni Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan persentase realisasi nilai investasi.

DPMPTSP pun ditunjuk untuk menyelenggarakan misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan nilai SAKIP. Sementara itu, untuk mencapai target indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP), DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Dan untuk mencapai target indikator tujuan Nilai SAKIP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selalu berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

- A. Misi Ke-4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
1. Tujuan ke-1 : Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 2. Indikator Tujuan : Persentase Realisasi nilai investasi
 3. Sasaran Startegis : Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah

4. Indikator Kinerja : Persentase realisasi nilai investasi
- B. Misi Ke-5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel
1. Tujuan ke-3 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
 2. Indikator Tujuan : Nilai SAKIP
 3. Sasaran Startegis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
 4. Indikator Kinerja : Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
- C. Misi Ke-5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel
1. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif
 2. Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik
 3. Sasaran Startegis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
 4. Indikator Kinerja : Nilai Interval Pelayanan Publik

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 secara singkat adalah sebagai berikut :

1. **Persentase realisasi nilai investasi**, pada tahun 2021 ditargetkan meningkat 6,57% . Sebagaimana diketahui bahwa reliasai investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp 349.898.121.679,00 dengan persentase realisasi -25,82%. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi nilai investasi pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tercatat Rp 795.644.384.776,00. Nilai investasi tersebut bilamana dipersamakan dalam rumus persentase realisasi investasi, menunjukkan hasil meningkatnya persentase realisasi nilai investasi sebanyak 127%.

Persentase Peningkatan Investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{795.644.384.776 - 349.898.121.679}{349.898.121.679} \times 100\% = 127\%$$

2. **Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**, pada tahun 2021 ditargetkan 87,17 dengan perkiraan capaian 87,17. Nilai ini merupakan nilai indikator sementara karena nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2021 diberikan setelah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
3. **Nilai interval pelayanan publik**, pada tahun 2021 ditargetkan 2,55-2,60 dengan capaian nilai interval 3,06-3,53 (nilai tepat nya pada 3,48).

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada realisasi nilai investasi tidak tercapai, hal tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor :

1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah
2. Peluang investasi yang dipromosikan belum tersedia sehingga gambaran permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik belum dapat terdefinisi, dan pengetahuan calon investor mengenai potensi investasi di Kabupaten Pangandaran belum muncul
3. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini
4. Proyek-proyek yang di tawarkan/ di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah
5. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
6. Dukungan anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
8. Pandemi global *Covid-19* yang memberikan dampak buruk di berbagai sektor

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara seluruh Pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Semoga hasil evaluasi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat menjadi dasar pemacu semangat dalam berupaya, bekerja keras, bersinergi, berinovasi dan berkolaborasi khususnya bagi seluruh pegawai dan staf DPMPTSP Kabupaten Pangandaran beserta SKPD teknis dan peran serta masyarakat.

Parigi, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. H. M. SOHBARUDIN
NIP 196308241985031003

Ditanda Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan. LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban kepada Bupati Pangandaran dan kepada publik baik berupa keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan persentase realisasi nilai investasi Kabupaten Pangandaran. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Renja sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja instansi pemerintah.

Diharapkan LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh Pegawai/staff DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dan *Stake Holder* terkait dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing OPD bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Penyusun menyadari bahwa dalam perumusan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa Penyusun terima dengan terbuka untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang demi terwujudnya sebuah pelayanan prima DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Demikian Penyusun sampaikan sebagai pengantar, atas penyajian LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Semoga DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Parigi, 31 Januari 2022
Salam hormat,

Penyusun

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4 Potensi	6
1.5 Kinerja Pelayanan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Visi dan Misi Daerah/Kabupaten/Kota	14
2.2 Tujuan	15
2.3 Sasaran	15
2.4 Rencana Strategis	16
2.5 Arah Kebijakan	16
2.6 Perencanaan Kinerja (Tahun Yang Dievaluasi)	20
2.7 Indikator Kinerja Utama	28
2.8 Perjanjian Kinerja	30
2.9 Laporan Anggaran Per Sasaran	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sebagaimana terangkum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 menterjemahkan hasil evaluasi perencanaan program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, LAKIP pun menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi evaluasi pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur dalam pencapaian Rencana Strategis. Disamping itu, penyusunan LAKIP ini juga bertujuan menjadi tindak lanjut atas masalah pencapaian kinerja yang tengah dihadapi dalam upaya perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 No. 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran

- Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP yang diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut :

1.3.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

1.3.2 Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- (1)Kepala Dinas
- (2)Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(3) Bidang Pengendalian Iklim, Promosi, Pengendalian dan Informasi

- a. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
- b. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi;

(4) Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;

(5) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:

- a. Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi;
- b. Seksi Kebijakan dan Pelaporan layanan

1.4 Potensi

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan organisasi, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 16 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:

Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 5(lima) orang, golongan III sebanyak 7 (tujuh) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Sumber Daya Apartur (Orang)	%
1	Golongan IV	5	31,25%
2	Golongan III	7	43,75%
3	Golongan II	4	25%
	Jumlah	16	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

A. Berdasarkan Jabatan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 12 (dua belas) orang, Fungsional Umum sebanyak 4 (empat) orang, Honorer sebanyak 13 (tiga belas) orang, Sukwan sebanyak 4(empat) orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Sumber Daya Aparatur	%
1.	Pejabat Struktural	12	36,36%
	a Eselon II Kepala Dinas	1	3,04%
	b Eselon III Sekretaris dan Kepala Bidang	4	12,12%
	c Eselon IV Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	7	21,21%
2.	Fungsional Umum	4	12,12%
3.	Honorer	13	39,39%
4.	Sukwan	4	12,12%
	Jumlah	33	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

B. Berdasarkan Pendidikan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan pendidikan terdiri dari SLTA sebanyak 4 (empat) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, S2 sebanyak 3 (tiga) orang, dan S3 sebanyak 1(satu) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Sumber Daya Aparatur	%
1	SLTA	4	25%
2	D3	1	6,25%
3	S1	7	43,75%
4	S2	3	18,75%
5	S3	1	6,25%
	Jumlah	16	100%

**Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

1.5 Kinerja Pelayanan

Sejarah singkat DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, pada awal berdiri dikenal sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pangandaran Peraturan Bupati Pangandaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2014.

Sementara itu seiring dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran dibentuklah DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 yang mana tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 yakni membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berpedoman pada penetapan pembentukan DPMPTSP sekaligus menyelaraskan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-4 (empat) Kabupaten Pangandaran yakni Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan persentase realisasi nilai investasi.



Tabel 1.4
 Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA			REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN					
						2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Visi : Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia																				
Misi 6 : Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan																				
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Realisasi nilai investasi	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	%	5,96	6,25	6,57	N/A Realisasi : Rp 269.331.393.391	101,68 Realisasi : Rp 543.189.364.000	-62,20 Realisasi : Rp 205.291.216.995	129,77 Realisasi : Rp 471.716.357.987	-25,82 Realisasi : Rp 57.202.644.444	127 Realisasi : Rp 795.644.384.776	N/A	N/A	-63,2	128,77	-26,82	127

**Data DPMPTSP s.d Tahun 2021

DPMPTSP pun ditunjuk untuk menyelenggarakan misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan nilai SAKIP. Sementara itu, untuk mencapai target indikator tujuan Nilai SAKIP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selalu berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk mencapai target indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP), DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Hal yang tak terpisahkan dari tingkat kepuasan masyarakat ialah kualitas pelayanan. Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, pariwisata, penataan ruang, bangunan, lingkungan hidup dan pertanahan. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pangandaran merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.5
Realisasi Jumlah Perizinan Tahun 2021

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Kabupaten Pangandaran	291
2	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) - Kab.Pangandaran	3
3	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter - Kabupaten Pangandaran	51
4	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi - Kabupaten Pangandaran	2
5	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) - Kabupaten Pangandaran	79
6	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) - Kabupaten Pangandaran	52
7	Izin Operasional Rumah Sakit (IORSK) - Kabupaten Pangandaran	0
8	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) - Kabupaten Pangandaran	26

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO	JENIS IZIN	JUMLAH
9	Surat Izin Apotek (SIA) - Kabupaten Pangandaran	0
10	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (TOWER) - Kabupaten Pangandaran	3
11	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame - Kabupaten Pangandaran	5
12	Surat Izin Kerja Radiografer - Kabupaten Pangandaran	1
13	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) - Kabupaten Pangandaran	33
14	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) - Kabupaten Pangandaran	1
15	Izin Galian Utilitas (IGU) - Kabupaten Pangandaran	0
16	IMB DPMPTSP Kab.Pangandaran (Splitting Perum)	0
17	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) - Kabupaten Pangandaran	5
18	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) - Kabupaten Pangandaran	1
19	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) - Kabupaten Pangandaran	0
20	Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis - Kabupaten Pangandaran	1
21	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) - Kabupaten Pangandaran	0
22	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIPdr.Spesialis) - Kab.Pangandaran	11
23	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien- Kab.Pangandaran	1
24	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPdrh.) Kab.Pangandaran	0
25	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Kab.Pangandaran	1
26	Izin Mendirikan Bangunan Non Gedung - Kabupaten Pangandaran	2
27	Data Calling Kabupaten Pangandaran	0
28	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) - Kabupaten Pangandaran	145
30	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) - Kabupaten Pangandaran	27
31	Contoh alur Izin-Pangandaran	3
32	Izin Operasional Satuan Pendidikan - Kab.Pangandaran	2
33	Izin Usaha Industri (IUI)	17
34	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	22
35	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	121
36	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	17
37	Izin Program Satuan Pendidikan	100
38	Lembaga Pelatihan Kerja	5
39	Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko Rendah	520
40	Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko Menengah Rendah	183
41	Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko Menengah Tinggi	135
42	Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko Tinggi	144
JUMLAH		2.010

1.6 Sistematika Penulisan

LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

1.4 Potensi

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.5 Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

➤ Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program organisasi.

➤ Rencana Kerja

Disajikan rencana tahun yang bersangkutan. Terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut. Dan indikator keberhasilan pencapaian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan. Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

A. Visi

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 sebagai berikut :

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa"

B. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Pernyataan misi membawa instansi kepada suatu fokus. Misi juga menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang akan dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Berikut ini merupakan Misi Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 yang mana Misi dengan cetak tebal merupakan Misi Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan

3. Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
4. **Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal**
5. **Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel**
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

2.2 Tujuan

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran turut serta membantu pencapaian tujuan dan sasaran daerah melalui misi Ke-4 (empat) yaitu **Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal**; dan misi yang Ke-5 (lima) yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel**.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka dalam hal ini DPMPTSP berupaya mewujudkan Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif.

2.3 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

2.4 Rencana Strategis

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja DPMPTSP yang dilaksanakan, memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Adapun strategi yang akan digunakan oleh DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penanaman modal
2. Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi penanaman modal daerah
3. Meningkatkan daya saing potensi investasi
4. Memberikan insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi
5. Meningkatkan promosi potensi investasi melalui even-even nasional
6. Pengawasan internal secara berkala
7. Evaluasi SAKIP
8. Memperkuat kewenangan dan koordinasi tim teknis perizinan
9. Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan secara online
10. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan
11. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
12. Mengembangkan layanan konsultasi dan/atau pengaduan

2.5 Arah Kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran diperlukan adanya kesatuan arah dan pola kerja. Untuk itu diperlukan kebijakan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Terkait hal tersebut sangat diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan dasar pijakan bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Pangandaran Tahunan 2021-2026. Adapun kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat di bidang penanaman modal
3. Penerapan standar pelayanan dan SOP yang transparan serta optimalisasi

layanan penanaman modal

4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan iklim investasi
6. Peningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan serta pengendalian investasi
7. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama investasi
8. Penyusunan dokumen potensi investasi unggulan daerah
9. Peningkatan kapasitas SDM
10. Pendampingan/asistensi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten
11. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan
12. Peningkatan kompetensi SDM
13. Penerapkan standar pelayanan konsultasi dan optimalisasi layanan pengaduan
14. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi
15. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Tabel 2.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada Urusan Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa			
Misi 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal			
Tujuan 1 : Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penanaman modal 2. Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi penanaman modal daerah 3. Meningkatkan daya saing potensi investasi 4. Memberikan insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi 5. Meningkatkan promosi potensi investasi melalui even-even nasional	1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat di bidang penanaman modal 3. Penerapkan standar pelayanan dan SOP yang transparan serta optimalisasi layanan penanaman modal 4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan iklim investasi 6. Peningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan serta pengendalian investasi 7. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama investasi 8. Penyusunan dokumen potensi investasi unggulan daerah
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	1. Pengawasan internal secara berkala 2. Evaluasi SAKIP	1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Pendampingan/asistensi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	1. Memperkuat kewenangan dan koordinasi tim teknis perizinan 2. Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan secara online 3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 5. Mengembangkan layanan konsultasi dan/atau pengaduan	1. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Penerapan standar pelayanan konsultasi dan optimalisasi layanan pengaduan 4. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
---	--	---	--

Sumber : Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.6 Perencanaan Kinerja (Tahun Yang Dievaluasi)

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, dengan mengacu pada tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dimaksudkan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut maka, ditetapkan beberapa kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Dalam hal ini kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Adapun rencana program prioritas dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja Prioritas

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	PENANAMAN MODAL		
A.	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PERTUMBUHAN JUMLAH INVESTOR	CAKUPAN PERTUMBUHAN JUMLAH INVESTOR
1	1. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN/LAPORAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN/LAPORAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN CETAK BIRU (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH DOKUMEN CETAK BIRU (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
		2. TERSEDIAANYA DOKUMEN FEASIBILITY STUDY	2. JUMLAH DOKUMEN FEASIBILITY STUDY

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
		POTENSI PELUANG INVESTASI	POTENSI PELUANG INVESTASI
		3. TERSEDIAANYA DOKUMEN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DITETAPKAN	3. JUMLAH DOKUMEN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DITETAPKAN
		4. TERSEDIAANYA KAJIAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	4. JUMLAH KAJIAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH
	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. TERLAKSANYA KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
		2. TERLAKSANYA KEGIATAN PELAPORAN REALISASI PMA & PMDN	2. JUMLAH KEGIATAN PELAPORAN REALISASI PMA & PMDN
2	2. PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA
	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA
	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA DOKUMEN KAJIAN PELUANG USAHA DAN PETA POTENSI USAHA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PELUANG USAHA DAN PETA POTENSI USAHA KABUPATEN/KOTA
B.	2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KEGIATAN PUBLIKASI PELUANG INVESTASI	CAKUPAN PENINGKATAN PELUANG INVESTASI YANG TERPUBLIKASI
1	1. PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA DOKUMEN/LAPORAN EVENT PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN EVENT PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN/MEDIA STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
		2. TERJALINNYA KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL/ INVESTASI	2. JUMLAH KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL/ INVESTASI YANG DIJALIN
		3. TERSEDIAANYA LAPORAN REALISASI PMA DAN PMDN	3. JUMLAH PELAPORAN REALISASI PMA DAN PMDN
		4. TERSEDIAANYA DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	4. JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA LAPORAN EVENT/PAMERAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DIKUTI	JUMLAH LAPORAN EVENT/PAMERAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DIKUTI
C.	3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
1	1. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TERPENUHINYA KETEPATAN JANGKA WAKTU PENERBITAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI SOP	JUMAH JANGKA WAKTU PENERBITAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TEPAT WAKTU SESUAI SOP
	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN/PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
		2. TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SERVICE	2. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SERVICE YANG DIKELOLA
	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGAJUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIEVALUASI DAN DIVERIFIKASI	1. JUMLAH DOKUMEN PENGAJUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIEVALUASI DAN DIVERIFIKASI
		2. TERSEDIAANYA DATA IDENTIFIKASI OBJEK PERIZINAN	2. JUMLAH OBJEK PERIZINAN YANG TERIDENTIFIKASI
		3. TERSEDIAANYA DATA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI OBJEK PENDAPATAN	3. JUMLAH OBJEK PENDAPATAN YANG DI INTENSIFIKASI DAN DI EKSTENSIFIKASI
		4. TERSEDIAANYA LAPORAN POTENSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	4. JUMLAH LAPORAN POTENSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
		5. TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PELAYANAN PERIJINAN	5. JUMLAH SEBARAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIJINAN YANG DISELENGGARAKAN
	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN YANG TERTANGANI
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH YANG DITETAPKAN DAN/ATAU YANG DIKAJI	1. JUMLAH DOKUMEN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH YANG DITETAPKAN DAN/ATAU YANG DIKAJI
		2. TERSEDIAANYA LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	2. JUMLAH LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
		3. TERSEDIAANYA LAPORAN PERSEPSI KORUPSI	3. JUMLAH LAPORAN PERSEPSI KORUPSI
D.	4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA KEPATUHAN INVESTOR PMDN DAN PMA DALAM MELAPORKAN	CAKUPAN KEPATUHAN PENDATAAN NILAI INVESTASI PMDN & PMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
		NILAI INVESTASINYA	TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DAERAH
1	1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIAANYA DATA ANALISA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH DATA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIANALISA
		2. TERLAKSANANYA KUNJUNGAN KE LOKASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG DIFOKUSKAN PADA PEMANTAUAN TERHADAP REALISASI INVESTASI	2. JUMLAH KUNJUNGAN KE LOKASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG DIFOKUSKAN PADA PEMANTAUAN TERHADAP REALISASI INVESTASI
		3. TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAN EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) YANG DISAMPAIKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KE BKPM MELALUI SISTEM OSS	3. JUMLAH VERIFIKASI DAN EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) YANG DISAMPAIKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KE BKPM MELALUI SISTEM OSS
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERSELENGGARANYA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM OSS DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM LKPM ONLINE	1. JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SISTEM OSS DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM LKPM ONLINE
		2. TERSELENGGARANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA	2. JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA YANG DISELENGGARAKAN
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERLAKSANANYA FASILITASI TERHADAP HAMBATAN/PERMASALAHAN PERUSAHAAN DALAM MEREALISASIKAN INVESTASINYA	1. JUMLAH FASILITASI PERMASALAHAN PERUSAHAAN DALAM MEREALISASIKAN INVESTASINYA
		2. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMERIKSAAN KE LOKASI PROYEK DALAM RANGKA PENGAWASAN	2. JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN KE LOKASI PROYEK DALAM RANGKA PENGAWASAN
		3. TERLAKSANYA KEGIATAN EVALUASI PERIZINAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA	3. JUMLAH PELAKSANAAN PERIZINAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA YANG DIEVALUASI
E.	5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1	1. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA	JUMLAH LAPORAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN**



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	TERSEDIA NYA LAPORAN PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	JUMLAH LAPORAN PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Selain program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana telah di jelaskan di atas, dalam rangka menggerakkan perangkat daerah DPMPTSP secara optimal juga dibutuhkan program dan kegiatan operasional yang bersifat rutin. Program dan kegiatan yang bersifat rutin ini menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas dalam rangka memberikan dukungan terhadap operasional kantor DPMPTSP Kabupaten Pangandaran supaya dapat berjalan secara maksimal. Adapun program dan kegiatan pendukung yang bersifat rutin adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



Tabel 2.4
Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja Penunjang

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	PENANAMAN MODAL		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD 2. TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI KEUANGAN 3. TERCAPAINYA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4. TERSEDIAANYA SARANA PRASARANA KANTOR 5. TERCAPAINYA PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	1. CAKUPAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS 2. CAKUPAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK 3. CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4. CAKUPAN SARANA PRASARANA KANTOR YANG TERPENUHI 5. CAKUPAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN REALISASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN REALISASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	TERPENUHINYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ASN YANG DISEDIAKAN
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN PADA SISTEM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
3	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
4	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
5	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	JUMLAH/JENIS PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	TERPENUHIYA KEBUTUHAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA YANG DIADAKAN
	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	TERSEDINYA LAPORAN REALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN REALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	TERSEDINYA LAPORAN REALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSELENGGARANYA KEGIATAN/MEDIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKSANAKAN
6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	TERPENUHUNYA PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DISEDIAKAN
	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	TELAKSANANYA PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD YANG DIKEMBANGKAN
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	TERSEDINYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	TERSEDINYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH/JENIS KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN PERALATAN	TERSEDINYA PERALATAN	JUMLAH/JENIS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA	PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DAN JENIS BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1. TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH) 2. TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH)	1. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH) 2. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH)
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	TERSEDIANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	TERSEDIANYA MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	JUMLAH MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH REKENING JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1. TERSEDIANYA JASA KEAMANAN KANTOR	1. JUMLAH JASA KEAMANAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
		2. TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR	2. JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
		3. TERSEDIANYA JASA PENGEMUDI KANTOR	3. JUMLAH JASA PENGEMUDI KANTOR YANG DISEDIAKAN
		4. TERSEDIANYA JASA PENGELOLA WEBSITE KANTOR	4. JUMLAH JASA PENGELOLA WEBSITE KANTOR YANG DISEDIAKAN
		5. TERSEDIANYA LAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	5. JUMLAH/JENIS LAYANAN MAKAN MINUM YANG DISEDIAKAN
8	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIADAKAN
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN**



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3	4
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	TERSEDIANYA PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIADAKAN
	PENGADAAN MEDEL	TERSEDIANYA MEDEL	JUMLAH DAN JENIS MEDEL YANG DIADAKAN
	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	TERSEDIANYA KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIADAKAN
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIADAKAN
	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1. TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1. JUMLAH GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN
		2. TERSEDIANYA DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DED)	2. JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DED)
		3. TERSEDIANYA SHELTER PELAYANAN PUBLIK	3. JUMLAH SHELTER PELAYANAN PUBLIK YANG DIADAKAN
9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIPELIHARA
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH/LUAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA

2.7 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 2.5 (T-C.25)
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Pangandaran 2021-2026

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENANAMAN MODAL							
	MISI 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal							
1.	Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38
	MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel							
2.	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	86,67	87,67	88,17	88,67	89,17	89,67	89,67
3.	Nilai Interval Pelayanan Publik	2,50 - 2,54	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06 - 3,15

2.8 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	6,57
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran	Nilai (87,17)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	Nilai Interval (2,55-2,60)

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.493.970.632,00	
Program Promosi Penanaman Modal	65.681.000,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	504.734.000,00	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.582.250,00	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0,00	
Total anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis	Rp 3.436.967.882,00	

2.9 Laporan Anggaran Per Sasaran

Pada pembahasan ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga disajikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian target pada awal periode perencanaan yang kemudian juga dialokasikan pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara rinci kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program tersebut beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif, yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selama periode perubahan renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Laporan Anggaran Per Sasaran Tahun 2021
DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	438.263.250,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	2.493.970.632,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	504.734.000,00
TOTAL		3.436.967.882,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu-rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja tahunan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan evaluasi kinerja tahun 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pembangian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal. Sejalan dengan peraturan tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yakni membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus mengembangkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran disusun sebagai mana penjelasan berikut:

Tabel 3.1
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi	Persentase (6,57)	Rp 795.644.384.776	Persentase realisasi investasi 127%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran	Nilai (87,17)	87,17	*Nilai Sementara (Nilai AKIP diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	Nilai Interval (2,55-2,60)	3,06-3,53	(nilai tepat nya pada 3,48)

Penjelasan :

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 secara singkat adalah sebagai berikut :

1. **Persentase realisasi nilai investasi**, pada tahun 2021 ditargetkan meningkat 6,57% . Sebagaimana diketahui bahwa reliasai investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp 349.898.121.679,00 dengan persentase realisasi -25,82%. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi nilai investasi pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tercatat Rp 795.644.384.776,00. Nilai investasi tersebut bilamana dipersamakan dalam rumus persentase realisasi investasi, menunjukkan hasil meningkatnya persentase realisasi nilai investasi sebanyak 127%.

Persentase Peningkatan Investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{795.644.384.776 - 349.898.121.679}{349.898.121.679} \times 100\% = 127\%$$

2. **Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**, pada tahun 2021 ditargetkan 87,17 dengan perkiraan capaian nilai 87,17 (masih proses perhitungan LHE AKIP DPMPTSP Pangandaran Tahun 2021 oleh Inspektorat).
3. **Nilai interval pelayanan publik**, pada tahun 2021 ditargetkan 2,55-2,60 dengan capaian nilai interval 3,06-3,53 (nilai tepat nya pada 3,48).

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan/ Indikator SPM	Target
1.	Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha
2.	Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).	1 Kali
3.	Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.	1 Kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	100%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali
6.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, walaupun tidak menjadi indikator kinerja secara langsung, akan tetapi indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut terlihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan. Adapun perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tahun 2021 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Table 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan/ Indikator SPM	Target Nasional	Realisasi (Tahun Yang Dievaluasi)
1.	Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha	N/A
2.	Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).	1 Kali	7 Kali
3.	Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.	1 Kali	1 Kali Keikutsertaan dalam pameran investasi
4.	Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	100%	100%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	7 Kali
6.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	100%
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	7 Kali

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pangandaran 2021

Beberapa faktor keberhasilan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh :

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Pangandaran
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran
4. Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
5. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagi media
6. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
7. Bantuan dana DAK Non Fisik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Namun terdapat pula target capaian yang belum terealisasi oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran diantaranya disebabkan oleh faktor :

1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah
2. Peluang investasi yang dipromosikan belum tersedia sehingga gambaran permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik belum dapat terdefinisi, dan pengetahuan calon investor mengenai potensi investasi di Kabupaten Pangandaran belum muncul.
3. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
4. Proyek-proyek yang di tawarkan/ di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
5. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.
6. Dukungan anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal.
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
8. Pandemi global *Covid-19* yang memberikan dampak buruk di berbagai sektor

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Perlu disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah/Kabupaten/Kota
2. Perlu adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota
3. Perlu adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
4. Perlu diadakan Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
5. Perlunya eksistensi dalam Kegiatan pameran penanaman modal
6. Perlu adanya Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
7. Perlu adanya Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota
8. Perlu adanya Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN yang rutin dan berkelanjutan
9. Perlu adanya peningkatan sistem/ teknologi untuk menjamin ketersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
10. Perlu adanya peningkatan kualitas layanan konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal

3.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bertujuan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat dan kemudahan pencapaian. Dari hasil evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi

Pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2021 secara finansial didukung oleh APBD Kabupaten Pangandaran dan tertuang sebagaimana data pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 4. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	1. Persentase (%) 2. Persentase (%) 3. Persentase (%) 4. Persentase (%)	1. Persentase (68%) 2. Persentase (68%) 3. Persentase (20%) 4. Persentase (55%)	2.493.970.632	1. Persentase (87,17%) 2. Persentase (87,17%) 3. Persentase (20%) 4. Persentase (55%)	2.350.449.675
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1. Persentase (%) 2. Persentase (%) 3. Persentase (%)	1. Persentase (68%) 2. Persentase (68%) 3. Persentase (68%)	26.144.000	1. Persentase (87,17%) 2. Persentase (87,17%) 3. Persentase (87,17%)	24.444.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Laporan	3	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kegiatan dan Dokumen	6	21.000.000	7,00	19.300.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Laporan	3	5.144.000	3,00	5.144.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persentase (%)	Persentase (68%)	1.990.812.060	Persentase (87,17%)	1.912.432.060
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	16	1.871.712.060	64,00	1.871.712.060
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	2	1.656.000	2,00	1.656.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	1	96.444.000	3,00	19.764.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	21.000.000	4,00	19.300.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Persentase (%)	68	21.000.000	87,17	19.300.000
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	Dokumen	1	21.000.000	4,00	19.300.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis dan Unit/Buah	61	21.000.000	46,00	19.300.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis dan Unit/Buah	61	21.000.000	46,00	19.300.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persentase (%)	55	17.400.000	55	16.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	1	17.400.000	43,00	16.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Jenis dan Unit/Buah	3	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Set	16	-	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	Data	1	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan dan Laporan	2	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	16	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	2	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persentase (%)	68	147.675.764	87,17	139.564.439
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Sistem	1	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis dan Unit/Buah	4	12.184.000	4,00	12.180.115
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis dan Unit/Buah	5	344.000	2,00	344.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis dan Unit/Buah	4	9.630.654	4,00	8.565.152
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis dan Eksemplar	2	15.600.000	3,00	11.949.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan dan Laporan	27	56.688.100	26,00	53.601.392
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jenis dan Unit/Buah	69	53.229.010	69,00	52.924.680
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persentase (%)	68	161.915.308	87,17	133.558.168
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Buah	110	2.000.000	117,00	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Rekening dan Bulan	2	50.521.700	8,00	46.841.360
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan dan Orang/Layanan	12	109.393.608	11,00	84.716.808
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persentase (%)	20	15.550.000	20	7.550.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis dan Unit/Buah	4	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah	4	15.550.000	1,00	7.550.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah	4	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1		-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	1		-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit dan M2	1		-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persentase (%)	20	92.473.500	20	78.301.008
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis dan Unit/Buah	61	7.360.000	2,00	7.360.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	40.608.000	3,00	29.881.765

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5	43.005.500	11,00	39.657.943
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	15	1.500.000	12,00	1.401.300
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	Jumlah Investor	137	-	2311	-
	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen/Laporan	2	-	-	-
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1. Jumlah Dokumen Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 2. Jumlah Dokumen Feasibility Study Potensi Peluang Investasi 3. Jumlah Dokumen Profil Potensi dan Peluang Investasi yang Ditetapkan 4. Jumlah Kajian dan Peluang Investasi Daerah	1. Dokumen 2. Dokumen 3. Dokumen 4. Dokumen	1	-	-	-
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1. Jumlah Kegiatan dan pelaporan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Jumlah kegiatan pelaporan realisasi PMA & PMDN	1. Kegiatan/Laporan 2. Kegiatan/ Laporan	2	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen/Laporan	2	-	-	-
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Peluang Usaha dan Peta Potensi Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	%	10	65.681.000	2	62.290.000
	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan/Dokumen/Laporan	2	65.681.000	-	62.290.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah/Jenis Kegiatan/Media Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Jumlah Kerjasama di Bidang Penanaman Modal/ Investasi yang dijalin 3. Jumlah Pelaporan Realisasi PMA dan PMDN 4. Jumlah dokumen kajian pengembangan penanaman modal	1. Kegiatan/ Media 2. Kegiatan/ Laporan 3. Laporan 4. Dokumen	1) 2 2) 1 3) 1 4) 1	-	-	-
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kab/Kota	Jumlah Laporan Event/Pameran promosi Penanaman Modal yang Diikuti	Kegiatan/ Laporan	4	65.681.000	2,00	62.290.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase (%)	70	504.734.000	80,00	240.639.051

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Persentase (%)	100	504.734.000	80,00	240.639.051
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah/Jenis Kegiatan/Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Jumlah/Jenis Kegiatan/Pelayanan Perizinan Berbasis Online Service yang dikelola	1. Kegiatan/Sistem 2. Kegiatan/Sistem	2	56.006.500	3,00	39.117.051
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1. Jumlah dokumen pengajuan perizinan dan non perizinan yang dievaluasi dan diverifikasi 2. Jumlah objek perizinan yang teridentifikasi 3. Jumlah objek pendapatan yang di intensifikasi dan di ekstensifikasi 4. Jumlah Laporan Potensi Perizinan dan Non Perizinan 5. Jumlah sebaran sosialisasi pelayanan perizinan yang diselenggarakan	1.Dokumen 2.Objek Perizinan 3.Objek Pendapatan 4.Laporan 5.Desas	1)250 2)250 3)250 4)1 5)15	438.605.000	#VALUE!	191.449.000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan penyelesaian pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang tertangani	Kegiatan/ Laporan	1	10.122.500	2,00	10.073.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1. Jumlah dokumen Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ditetapkan dan/atau yang dikaji 2. Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat 3. Jumlah laporan persepsi korupsi	1. Dokumen 2. Laporan 3. Laporan	1) 1 2) 1 3) 1	-	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	322,1	372.582.250	795,64	341.481.800
	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jenis Kegiatan/ Dokumen/ Laporan	3	372.582.250	3,00	341.481.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal yang dianalisa 2. Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap realisasi investasi 3. Jumlah verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui sistem OSS	1. Kegiatan/ Laporan 2. Kegiatan/ Laporan 3. Kegiatan/ Laporan	9	50.820.000	9,00	50.820.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran DPPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	3	4		5		10 = 6+7+8+9	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah Bimbingan Teknis Sistem OSS dan Bimbingan Teknis Sistem LKPM Online 2. Jumlah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Sosialisasi Kemitraan Usaha yang Diselenggarakan	1 Kegiatan/ Laporan 2. Kegiatan/ Laporan	9	227.261.800	9,00	196.281.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah Fasilitasi permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya 2. Jumlah Kegiatan pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan 3. Jumlah pelaksanaan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha yang dievaluasi	1. Kegiatan/ Laporan 2. Kegiatan/ Laporan 3. Kegiatan/ Laporan	14	94.500.450	14,00	94.380.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase (%)	10	-	-	-
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	10	-	-	-
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem/ Laporan	2	-	-	-

3.2.1 Evaluasi Target Kinerja dan Anggaran Terhadap RKPD Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

URUSAN PENANAMAN MODAL

A. Pelaksanaan Program Kegiatan

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja (1) Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas; (2) Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; (3) Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; dan (4) Persentase peningkatan kompetensi aparatur, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.493.970.632 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 2.350.449.675. .
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja; (1) Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu; (2) Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; (3) Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu, dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.144.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 24.444.000.
 - 1.1 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.144.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 5.144.000.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.990.812.060 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.912.432.060.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.871.712.060 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.871.712.060.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah

laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.656.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.656.000.

2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.444.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.764.000.

2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.

3.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.

4.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 19.300.000.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.400.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 16.000.000.

5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, memiliki indikator kinerja Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.400.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 16.000.000.

5.2 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, memiliki indikator kinerja Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

yang ditingkatkan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

- 5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, memiliki indikator kinerja Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.4 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, memiliki indikator kinerja Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.5 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, memiliki indikator kinerja Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.6 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memiliki indikator kinerja Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 5.7 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, memiliki indikator kinerja Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp0,00.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 147.675.764 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 139.564.439.
 - 6.1 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, memiliki indikator kinerja Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.184.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 12.180.115.
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 344.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 344.000.
 - 6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, memiliki indikator kinerja Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.630.654 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 8.565.152.
 - 6.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.600.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 11.949.100.

6.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, memiliki indikator kinerja Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 56.688.100 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 53.601.392.

6.7 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 53.229.010 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 53.601.392.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 161.915.308 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 133.558.168.

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, memiliki indikator kinerja Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 2.000.000.

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, memiliki indikator kinerja Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.521.700 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 46.841.360.

7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, memiliki indikator kinerja Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 109.393.608 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 84.716.808.

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.550.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 7.550.000.

8.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.

8.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.550.000 yang mana s.d TW IV

teralisasi sebesar Rp 7.550.000.

- 8.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, memiliki indikator kinerja Jumlah mebel yang diadakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 8.4 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, memiliki indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 8.5 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
- 8.6 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memiliki indikator kinerja Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 92.473.500 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 78.301.008.
 - 9.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.360.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 7.360.000.
 - 9.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, memiliki indikator kinerja Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 40.608.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 29.881.765.
 - 9.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, memiliki indikator kinerja Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 43.005.500 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 39.657.943.
 - 9.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, memiliki indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 1.401.300.
- (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki indikator

- kinerja Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
10. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
 - 10.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja (1) Jumlah Dokumen Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal; (2) Jumlah Dokumen Feasibility Study Potensi Peluang Investasi; (3) Jumlah Dokumen Profil Potensi dan Peluang Investasi yang Ditetapkan; (4) Jumlah Kajian dan Peluang Investasi Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 10.2 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja (1) Jumlah Kegiatan dan pelaporan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; (2) Jumlah kegiatan pelaporan realisasi PMA & PMDN, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
 11. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
 - 11.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
 - 11.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Kajian Peluang Usaha dan Peta Potensi Usaha Kabupaten/KotaUsaha Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - (3) Program Promosi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 62.290.000.
 12. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp

- 62.290.000.
- 12.1 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja (1) Jumlah/Jenis Kegiatan/Media Strategi Promosi Penanaman Modal ; (2) Jumlah Kerjasama di Bidang Penanaman Modal/ Investasi yang dijalin; (3) Jumlah Pelaporan Realisasi PMA dan PMDN; (4) Jumlah dokumen kajian pengembangan penanaman modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp0.
- 12.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Event/Pameran promosi Penanaman Modal yang Diikuti, dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 62.290.000.
- (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 504.734.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 240.639.051.
13. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Persentase Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP, dengan pagu anggaran sebesar Rp 504.734.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 240.639.051.
- 13.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, memiliki indikator kinerja ; (1)Jumlah/Jenis Kegiatan/Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; (2) Jumlah/Jenis Kegiatan/Pelayanan Perizinan Berbasis Online Service yang dikelola, dengan pagu anggaran sebesar Rp 56.006.500 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 39.117.051.
- 13.2 Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja; (1) Jumlah dokumen pengajuan perizinan dan non perizinan yang dievaluasi dan diverifikasi; (2) Jumlah objek perizinan yang teridentifikasi; (3) Jumlah objek pendapatan yang di intensifikasi dan di ekstensifikasi; (4) Jumlah Laporan Potensi Perizinan dan Non Perizinan; (5) Jumlah

sebaran sosialisasi pelayanan perijinan yang diselenggarakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 438.605.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 191.449.000.

13.3 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, memiliki indikator kinerja Jumlah kegiatan pelayanan penyelesaian pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang tertangani, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.122.500 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 10.073.000.

13.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, memiliki indikator kinerja; (1) Jumlah dokumen Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ditetapkan dan/atau yang dikaji; (2) Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat; (3) Jumlah laporan persepsi korupsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.

(5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah, dengan sumber pagu anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp 372.582.250 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 341.481.800.

14. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan, dengan sumber pagu anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp 372.582.250 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 341.481.800.

14.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja; (1) Jumlah data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal yang dianalisa; (2) Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap realisasi investasi; (3) Jumlah verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui sistem OSS, dengan sumber pagu anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp 50.820.000 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 50.820.000.

14.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja ; (1) Jumlah Bimbingan Teknis Sistem OSS dan Bimbingan Teknis Sistem LKPM Online; (2)

Jumlah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Sosialisasi Kemitraan Usaha yang Diselenggarakan, dengan sumber pagu anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp 227.261.800 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 196.281.800.

- 14.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja; (1) Jumlah Fasilitas permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya; (2) Jumlah Kegiatan pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan; (3) Jumlah pelaksanaan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha yang dievaluasi, dengan sumber pagu anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp 94.500.450 yang mana s.d TW IV terealisasi sebesar Rp 94.380.000.
- (6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, memiliki indikator kinerja Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
15. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator kinerja Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.
- 15.1 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Pangandaran kepada Bupati Pangandaran dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya.

Tugas utama DPMPTSP Kabupaten Pangandaran ialah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berpedoman pada penetapan pembentukan DPMPTSP sekaligus menelaraskan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-4 (empat) Kabupaten Pangandaran yakni Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan persentase realisasi nilai investasi.

DPMPTSP pun ditunjuk untuk menyelenggarakan misi ke-5 (lima) Kabupaten Pangandaran yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Dalam membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berupaya mencapai indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan nilai SAKIP. Sementara itu, untuk mencapai target indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP), DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Dan untuk mencapai target indikator tujuan Nilai SAKIP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran selalu berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 secara singkat adalah sebagai berikut :

1. **Persentase realisasi nilai investasi**, pada tahun 2021 ditargetkan meningkat 6,57% . Sebagaimana diketahui bahwa reliasai investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp 349.898.121.679,00 dengan persentase realisasi -25,82%. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi nilai investasi pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran tercatat Rp 795.644.384.776,00. Nilai investasi tersebut bilamana dipersamakan dalam rumus persentase realisasi investasi, menunjukkan hasil meningkatnya persentase realisasi nilai investasi sebanyak 127%.

Persentase Peningkatan Investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi investasi tahun } n-1$$

$$\frac{795.644.384.776 - 349.898.121.679}{349.898.121.679} \times 100\% = 127\%$$

2. **Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**, pada tahun 2021 ditargetkan 87,17 dengan perkiraan capaian 87,17. Nilai ini merupakan nilai indikator sementara karena nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2021 diberikan setelah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
3. **Nilai interval pelayanan publik**, pada tahun 2021 ditargetkan 2,55-2,60 dengan capaian nilai interval 3,06-3,53 (nilai tepat nya pada 3,48).

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran pada realisasi nilai investasi tidak tercapai, hal tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor :

1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah
2. Peluang investasi yang dipromosikan belum tersedia sehingga gambaran permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik belum dapat terdefinisi, dan pengetahuan calon investor mengenai potensi investasi di Kabupaten Pangandaran belum muncul
3. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini
4. Proyek-proyek yang di tawarkan/ di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah
5. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
6. Dukungan anggaran pada program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
8. Pandemi global *Covid-19* yang memberikan dampak buruk di berbagai sektor

LAKIP DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan uraian evaluasi atas program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting karena akan menentukan keberhasilan terwujudnya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran serta mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Semoga DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja.

Parigi, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN

NIP 196308241985031003

Ditanda Tanggal :